

Globethics Repository



Politik Kaum Perempuan, Mendemokratisasi Desa (Political Women, democratizing the Village)

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	IRE;IRE
Publisher	IRE
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-13 04:40:36
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/189351

Politik Kaum Perempuan Mendemokratisasi Desa

Ringkasan

Kemiskinan tak disangkal lagi berwujud perempuan. Hal ini karena pembangunan yang berlangsung masih bias gender. Seiring dengan adanya peran pengorganisasian terhadap kaum perempuan, kini perempuan mulai bangkit mengorganisir diri dan membuka akses untuk terlibat aktif dalam tata kelola pemerintahan (*governance*) di desa, memperkuat jaringan dalam pemberdayaan masyarakat, baik dalam isu lingkungan, ketahanan pangan, simpan pinjam usaha permodalan sampai urusan kepemimpinan desa. Bintang perempuan kini mulai bersinar di tingkat desa. Praktek yang baik ini akan semakin membuat perempuan bersinar, jika pemerintah terus membuka diri terhadap keterlibatan kaum perempuan melalui kebijakan (1) gender perspektif yang menyatu dalam struktur politik dan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah dan desa agar representasi dan akses kaum perempuan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan semakin kuat. (2) Memperkuat kouta *affirmative action* perempuan di berbagai sektor lembaga pemerintahan, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dari pusat hingga desa (3) memperluas dan memperdalam inovasi dan *best practices* yang kini mulai banyak dimunculkan oleh kaum perempuan.

Ketimpangan pembangunan yang berlangsung selama ini telah menghadirkan kemiskinan berwujud perempuan (*poverty has a women face*), sebagaimana yang dilansir oleh laporan UNDP pada tahun 1995. Kondisi semacam ini dialami pula oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di tingkat lokal-pedesaan. Sejauh ini, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, baik itu melalui regulasi maupun

implementasi program pembangunan. Namun berbagai regulasi dan project pembangunan yang digerakkan di tingkat pusat, terkadang kurang efektif implementasinya di tingkat lokal. Dimensi lokalitas terkadang kurang diperhatikan sehingga menghasilkan capaian minimalis dan terkadang berakhir tanpa hasil.

Tulisan ini berupaya mengangkat isu peran politik kaum perempuan dalam merebut ruang publik dan tata kelola pemerintahan (*governance*) di tingkat desa yang demokratis untuk menjawab problem kemiskinan yang berwujud perempuan, khususnya yang terjadi di Indonesia bagian timur yang menjadi wilayah dampingan ACCESS (*Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme*). Diharapkan melalui tulisan ini, para pemegang kebijakan di tingkat pusat dan daerah dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan lokal yang demokratis melalui peran keterlibatan politik kaum perempuan di berbagai tempat lainnya di Indonesia.

Governance dan Gender Perspektif

Sebagaimana dilansir dimuka bahwa pembangunan yang bias gender telah mengakibatkan feminisasi kemiskinan, atau kemiskinan berwujud perempuan. Indikatornya dapat dilihat dari tiga aspek utama, yakni: **Pertama**, populasi jumlah warga miskin di dunia lebih banyak dialami atau diisi oleh kaum perempuan. Berdasarkan data PBB, sebanyak 1,3 miliar warga dunia yang masuk katagori miskin, 70% nya adalah perempuan. Untuk Kasus Indonesia sendiri, mayoritas jumlah penduduknya juga berjenis kelamin perempuan. Begitu pula dengan jumlah kaum perempuan yang tinggal di desa, populasinya lebih besar dibandingkan kaum laki-laki.

Kedua, adanya disparitas bisa juga dikatakan diskriminasi dalam pemberian upah kerja antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana laporan BPS-KPP tahun 2002, untuk kasus yang terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat

(NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), rata-rata upah perempuan di sektor non pertanian jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. **Ketiga**, minimnya akses perempuan terhadap kepemilikan aset.

Ketiga aspek feminisasi kemiskinan ini bekerja dalam pusaran tata kelola pemerintahan (*governance*), pasar dan institusi sosial kemasyarakatan lainnya sehingga tak jarang kaum perempuan mengalami realitas kemiskinan yang akut, tak jarang pula mengalami praktek kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat karena pola relasi sosial patriarkis. Dalam konteks inilah mengapa tata kelola pemerintahan yang mengedepankan gender *maenstreaming* menjadi penting untuk mengatasi feminisasi kemiskinan akibat dari laju pembangunan yang bias gender.

Sebagaimana mandat utama pembangunan millinium-*Millineum Development Goals* (MDG's) yang meletakkan perempuan sebagai prioritas dalam proses dan pencapaian hasil –hasil pembangunan. Meletakkan gender perspektif dalam tata kelola pemerintahan agar berpihak pada kaum perempuan merupakan langkah penting untuk direalisasikan. Agar gender perspektif ini tidak sekadar menjadi wacana dalam politik pembangunan suatu pemerintahan, maka harus didorong kedalam struktur dan sistem politik di dalam tata pemerintahan (*governance*). Sebab gender perspektif hanya dapat bekerja secara baik dalam struktur dan sistem politik yang demokratis. (Baden:2003).

Pendekatan yang paling strategis adalah dengan melakukan tindakan *affirmative action* dalam berbagai regulasi yang ada, memperkuat representasi kaum perempuan dalam peran kepartaian dan kepemimpinan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan lainnya. (Saward:2008, Widiyanto:2011). Peluang ini relatif terbuka dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2003 yang memberi tekanan adanya 30% kouta perempuan di Parlemen. Dengan cara ini maka akses kaum perempuan dalam mempengaruhi kebijakan publik semakin berdaya, khususnya dalam politik penganggaran pembangunan (*development budget*) lebih berpihak pada kaum perempuan.

Gender perspektif yang melekat dalam struktur politik dan sistem pemerintahan akan menciptakan pola relasi yang setara antara kaum perempuan dan laki-laki dalam bingkai kewarganegaraan (*citizenship*). (Faqih: 1996). Perempuan sebagai *citizen*, eksistensinya sebagai warga negara yang utuh tanpa dapat dipilah atau direduksi keperempuannya oleh peran domestifikasi kultural dalam perspektif patriarkhi. Tata kelola pemerintahan yang baik (*democratic governance*) dalam pembangunan harus terus mempromosikan semangat dan praktek akan hal ini. Bukan sebaliknya, yakni mempromosikan tata kelola pemerintahan yang patriarkhis. Jika hal itu yang terjadi, maka sama saja praktek *governance* melanggengkan feminisasi kemiskinan.

Pengalaman ACCESS

Dalam lima tahun terakhir ini, di kawasan Indonesia bagian timur yakni di Propinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, sungguh menarik apa yang dilakukan oleh ACCESS bersama dengan para mitra lokalnya, dalam mendorong tata kelola pemerintahan lokal (baca-desa) yang demokratis dengan menggunakan pendekatan yang memadukan antara *community lead action and participatory progres* (CLAPP), *asset based approach* (ABA), penyelidikan apresiatif (*appresiative inquiry*) dan *gender equity and social inclusion* (GSI). Para mitra ACCESS melakukan pengorganisasian terhadap kaum perempuan melalui pengembangan kapasitas, membangun jaringan sosial dan mengakses tata kelola pemerintahan lokal yang berpihak pada kepentingan kaum perempuan dan anak.

Hasilnya mulai menggembirakan, yakni terjadi perubahan secara signifikan pola relasi antara kaum perempuan (miskin utamanya) dengan kaum laki-laki dalam memainkan peranan dalam keluarga dan proses membangun keterlibatan dalam urusan tata pemerintahan. (Rozaki:2012, Puthut EA:2011,). Kaum perempuan kini tidak sekedar bergorganisasi sebatas di PKK, namun mengalami perluasan berdasarkan isu publik melampaui batasan desanya.

Kaum perempuan, khususnya yang tergabung pada Kader Penggerak Pembangunan Desa (KaPeDes) dan Fasilitator Pendamping Desa (Fasping) menjadi motor utama dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Program Desa (RKPDDes) yang sensitif gender dan kaum miskin di desanya. Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam proses Musrenbangcam dan Musrebangkab. Bahkan saat memimpin desa, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Andi Hidayati, Kepala Desa Bongaya, Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan sungguh mengagumkan, sebagai Kepala ia membuat kebijakan pendidikan dengan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan memberi insentif guru pengajarnya, sedangkan untuk sektor kesehatan memperkuat program Posyandu agar kebutuhan Ibu dan anak terlayani dengan baik. Kebijakan ini proses pendanaannya dialokasikan dari APBDes.

Begitu juga yang dilakukan oleh Ibu Chandra Kumala—Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB, yang memotori peran pengawasan menjadi partner pemerintahan desa yang baik. Ia melalui institusi BPD mampu mengerakkan kaum perempuan di desa untuk melakukan kontrol dan pengawasan pada pembelian belanja barang dan jasa dari pemerintah yang masuk ke desanya, khususnya yang terkait dengan Posyandu. Melalui peran pengawasan ini, belanja barang dan jasa di desanya tak lagi muncul praktek korupsi dan kecurangan lainnya.

Selain aktif mempengaruhi kebijakan pembangunan di desa, kaum perempuan juga terlibat langsung dalam proses

pemberdayaan masyarakat. Mulai dari isu lingkungan, seperti ketahanan pangan, permodalan usaha ataupun pendidikan anak. Hal ini sebagai bagian dari proses mengatasi feminisasi kemiskinan, sebagaimana yang terjadi di Desa Mbatakpidu Kecamatan Waingapu Sumba Timur, yakni peranan Kelompok Wanita Tani (KWT) Tapa Walla Badi yang dimotori oleh Marlina Rambu Meha dan Konda Ngguna menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. KWT ini menjadi penggerak kaum perempuan dengan memanfaatkan aset lokal yang dimilikinya untuk berdikari secara ekonomi melalui kegiatan usaha kerajinan tenun ikat, kini produknya sudah mulai merambah pasar di Jakarta, kegiatan peternakan hewan kecil dan kemampuannya mengelola lahan kering di Jawa Wula (4.200 meter persegi) dan Wailingga (1,5 hektar) dengan aneka jenis tanaman lokal seperti jagung, kacang-kacangan, sorgum, jawawut, umbi-umbian dan pisang.

Dengan bimbingan BP3K, KWT ini berhasil melakukan uji coba singkong mukibat-hasil persilangan antara jenis lokal dan singkong karet. Dari satu pohon singkong mukibat menghasilkan sekitar 22 kg umbi segar. Sementara singkong lokal hasilnya hanya 2 kg per pohon. (kompas/6/3/12). Tak heran bila KWT ini berhasil menembus 16 nominasi peserta peraih **Kehati Award** ke 7 dari 100 peserta perseorangan/kelompok. Penghargaan Kehati ini untuk kategori ketahanan pangan pada perseorangan atau kelompok yang berjuang keras untuk mengusahakan ketahanan pangan dengan mengandalkan berbagai jenis pangan lokal.

Sedangkan untuk peran sosial ekonomi, yakni dengan melakukan kegiatan arisan simpan pinjam yang besarnya Rp. 100.000 per orang/bulan. Uang arisan ini berasal dari pendapatan yang mereka sisihkan dari hasil penjualan tenun. Sedangkan yang paling unik dari sekian banyak arisan itu adalah arisan pendidikan anak yang dilakukan oleh 24 orang ibu yang dipimpin oleh Ibu Desa—istri Kepala Desa Mbatakpidu Sumba Timur. Arisan pendidikan ini di kopyok(diundi) sebulan sekali, perorang iurannya sebanyak 25 ribu rupiah. Setiap pemenang hanya boleh mengambil sebanyak 60 ribu rupiah, sisanya yang sebanyak 480.000,- langsung masuk tabungan rekening pendidikan anak. Para ibu yang menang arisan, hanya boleh mengambil uang tersebut ketika sang anak sudah lulus SMA. Ibu Konda Ngguna—yang juga anggota KWT Tapa Walla Badi-- mulai merasakan manfaat arisan pendidikan ini. Uang dari hasil arisan pendidikan digunakannya saat anaknya berhasil melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu desa saat saya temui, program arisan pendidikan ini untuk melahirkan banyak sarjana dari Desa Mbatakpidu, sehingga melalui pendidikan yang meningkat sampai ke jenjang sarjana maka diharapkan kemajuan Desa Mbatakpidu akan semakin baik di masa depan.

Praktek baik lainnya dari prestasi yang ditorehkan kaum perempuan ini sebagaimana yang juga terjadi di Kabupaten

Kupang. (Dyah Widuri:2012). Kaum perempuan yang tergabung di JARPUK (Jaringan Kerja Perempuan Usaha Kecil) mampu mengeser peran para rentenir dalam mengintervensi kebutuhan permodalan usaha warga desa. JARPUK tidak hanya memberikan akses permodalan, namun juga melakukan *capacity building* usaha kaum perempuan agar memiliki produksi yang berkualitas dan laku di pasar.

JARPUK ini memiliki 13 KPUK di empat kecamatan, dan masing-masing KPUK terdiri dari 10 s/d 15 PUK yang bergerak di bidang industri makanan, kerajinan, dan pertanian. Untuk JARPUK Ina Fo'a saja, kini memiliki keanggotaan sekitar 500 PUK yang tergabung dalam lebih dari 20 KPUK, dengan bidang usaha peternakan babi dan ayam, pengolahan makanan lokal, tenun ikan dan kerajinan, simpan pinjam, kebun pertanian, dan pemasaran hasil usaha. Sedangkan JARPUK *Feto Hamutuk*, yang didirikan tahun 2006, memiliki anggota 11 KPUK atau 109 orang yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang kecil di pasar Oesao, salah satu pasar yang sangat aktif di kecamatan Kupang Timur.

Proses dan dinamika yang menggembirakan terjadi di tingkat lokal ini sudah selayaknya didorong dan direplikasi diberbagai tempat lainnya sehingga cakupannya juga lebih luas, tidak hanya di lingkaran desa dan kecamatan, juga kabupaten, propinsi sampai pemerintahan di tingkat nasional. Dalam konteks ini pula, sudah selayaknya program pembangunan di tingkat pemerintahan dan juga sektor swasta lainnya benar-benar melatekan kaum perempuan sebagai subyek pembangunan. Semakin memberi penghargaan terhadap prestasi dan capaian mereka melalui adanya akses yang diperluas terhadap sumber-sumber *resources* lainnya.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk memerangi kemiskinan berwajah perempuan dan dengan memperhatikan dinamika dan inovasi yang baik yang telah dilakukan oleh kaum perempuan di des-desa mitra ACCESS, maka akan sangat bermanfaat pula jika pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah memperkuat akses dan peran keterlibatan kaum perempuan di dalam berbagai level. Adanya pemerintahan yang semakin terbuka (*open goverment*) terhadap peran kaum perempuan maka akan membuat legitimasi pemerintah juga semakin kredibel dihadapan masyarakatnya. Untuk itu, beberapa tahapan dalam melakukan proses kebijakan adalah dengan melakukan sebagaimana berikut ini:

- 1) Mendorong gender perspektif menyatu dalam struktur politik dan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah dan desa agar representasi dan akses kaum perempuan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan semakin kuat. Hal ini nantinya dapat tercermin dari mulai perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berpihak terhadap kaum perempuan.

- 2) Memperkuat kouta *affirmative action* perempuan di berbagai sektor lembaga pemerintahan, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dari pusat hingga desa. Melalui kebijakan ini peluang bagi kaum perempuan untuk lebih terlibat lagi secara lebih mendalam di dalam menjalankan peran-peran kewarganegaraan agar lebih leluasa sehingga tidak menjadi warga negara kelas dua (*the second citizenship*).
- 3) Sudah semestinya stakeholders yang ada, khususnya institusi pemerintahan dan swasta mempromosikan, memperluas dan memperdalam berbagai prestasi kaum perempuan dalam mendorong perubahan sosial kedalam skema kebijakan yang nantinya dikembangkan sehingga dengan cara ini efek perubahannya akan semakin tampak nyata dan berkelanjutan. Adanya proses kebijakan yang meresistensi terhadap praktek yang baik sebagaimana prestasi yang dibuat oleh kaum perempuan sebagaimana terurai diatas, haruslah sedapatkan mungkin dihindari karena hal itu langkah mundur dari semangat berdemokrasi. 🌱

Daftar Bacaan

- Baden Sally, Gender, *Tata Pemerintahan dan Feminisasi Kemiskinan, dalam Partisipasi Politik Kaum Perempuan dan Tata Pemerintahan Yang Baik, Tantangan Abad 21*, UNDP, 2003.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Human Development Report, New York: UNDP, 1995.
- Rozaki, Abdur, *Mutiara Dari Sumba Timur: Praktek institusi Desa Yang Baik*, Laporan Desk Study Project Stock taking studies program ACCESS untuk advokasi kemandirian desa dan penanggulangan kemiskinan, Kerjasama IRE-ACCESS, 2012.
- Rozaki, Abdur, *Dari Desa Krisis Pangan Menuju Desa Mandiri Pangan: Pelajaran Berharga dari Desa Mbatakapidu Sumba Timur*, Laporan Field Study Project Stock taking studies program ACCESS untuk advokasi kemandirian desa dan penanggulangan kemiskinan, Kerjasama IRE-ACCESS, 2012
- Puthut EA dan IBK Yoga Atmaja, *Metamorfosa Negeri Savana: Rampai Kisah Perubahan Personal, Lembaga dan Komunitas*, Penerbit ACCESS dan Kawanusa, Bali, 2011 .
- Saward, M., "Representation and Democracy: Revisions and Possibilities", *Sociology Compas* Vol.2 No.3, 2008.

Shiva, Vandana dan Maria Mies, *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, IRE Press: Yogyakarta, 2005.

Tim IRE, *Reformasi SPPN untuk Memperkuat Representasi Warga*, Policy Brief, 2012.

Whitehead, Ann, *Failing Women, Sustaining Poverty*, London: Report for The UK Gender and Development Network, 2003.

Widianto dan Syafa'atun Kariadi, *Representasi Populer dalam Penganggaran Partisipatif*, Demos: Jakarta, 2011.

Widuri, Dyah dan Patje Saubaki, *Partisipasi Warga dalam Pengentasan Kemiskinan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Laporan Desk Study Project Stock taking studies program ACCESS untuk advokasi kemandirian desa dan penanggulangan kemiskinan, Kerjasama IRE-ACCESS, 2012.

Ditulis oleh Abdur Rozaki
Peneliti IRE Yogyakarta
rozaki75@gmail.com

Institute for Research and Empowerment (IRE)

adalah sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nonprofit, yang berbasis pada komunitas akademik di Yogyakarta. Fokus kegiatan IRE adalah memperluas dan memperdalam demokrasi melalui penguatan gagasan, sikap kritis serta tindakan taktis elemen masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan negara.

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Dusun
Tegalrejo RT 01/RW 09 Desa Sariharjo Kec.
Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581 Telp 0274 -
867686, 7482091 Email: office@ireyogya.org
website: <http://www.ireyogya.org>